



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 20 September 2016

Halaman: 9

RENCANA PENGANGGARAN DIBATALKAN Akhirnya, Panti Karya Dikelola Pemda DIY

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akhirnya resmi melepas pengelolaan Panti Karya ke Pemda DIY. Alokasi anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan untuk 2017, terpaksa dibatalkan. Namun hingga akhir Desember 2016, Pemkot masih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan warga binaan.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Hadi Muhtar, alokasi anggaran untuk Panti Karya harus direncanakan sejak awal pembahasan RAPBD lantaran sangat berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.

"Di sana kan setiap hari harus menyiapkan makan.

Kami pun sudah merencanakan anggarannya, tapi ternyata Pemda DIY bersedia mengambil alih. Ya sudah, anggarannya batal," ungkapnya, Senin (19/9).

Alokasi anggaran di Panti Karya selama dua tahun terakhir mencapai Rp 2,2 miliar pertahun. Hadi Muhtar memaparkan, sesuai aturan dari pemerintah pusat, setiap

panti yang melakukan upaya rehabilitasi kewenangannya berada di DIY. Sedangkan untuk rehabilitasi narkoba oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, Panti Karya yang bertugas merehabilitasi warga psikotik dan penyakit sosial lainnya otomatis harus diserahkan ke DIY.

Akan tetapi, rencana pelimpahan itu sempat urung dilakukan lantaran pemerintah pusat dinilai tidak konsisten. Terutama dalam hal pengambilalihan panti rehabilitasi narkoba yang selama ini dikelola oleh Pemda DIY. Sehingga, sebelum ada kebijakan dari pemerintah pusat, maka pengelolaan panti

tetap seperti semula.

"Ada perkembangan terbaru jika pelimpahan itu sifatnya sudah mengikat. Pemda DIY akhirnya bersedia menangani Panti Karya. Berarti per-Januari 2017, anggaran juga akan dibebankan ke sana, bukan kota lagi," urainya.

Hanya, masih ada persoalan terkait ketenagakerjaan. Pasalnya, dari total sekitar 40 pegawai yang selama ini membantu operasional di Panti Karya, status PNS hanya ada delapan orang. Selain itu, tujuh orang lainnya merupakan tenaga bantuan, dan sisanya atau mayoritas merupakan pegawai outsourcing.

Banyaknya tenaga kerja outsourcing tersebut lantaran pengangkatan tenaga kerja sudah dibatasi. Padahal ada ratusan warga binaan Panti Karya yang setiap hari harus dilayani. Pihaknya khawatir, jika nasib tenaga kerja ikut terdampak akibat pelimpahan kewenangan.

"Secara normatif, pegawai yang diakui hanyalah PNS. Tapi akan kami komunikasikan. Mereka yang outsourcing masa kerjanya selalu habis Desember, tapi kemudian dikontrak lagi untuk setahun ke depan. Semoga tetap diakomodasi," tandasnya. (Dhi)-k

Instansi	Tindak Lanjut
1.	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Jumpa Pers
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005